

BAB II

STUDI PUSTAKA

2.1 Deskripsi Konseptual

Deskripsi konseptual adalah penjelasan teoretis tentang konsep atau variabel penelitian yang membantu merumuskan kerangka teoretis dan model konseptual (Sakaran & Bougie, 2020).

2.1.1 Agency Theory

Agency Theory menjelaskan hubungan kontraktual antara principal sebagai pihak pemberi amanah dan agent sebagai pihak yang diberi wewenang untuk mengelola sumber daya, Purba, (2023). Dalam konteks pemerintahan daerah, masyarakat dan pemerintah pusat bertindak sebagai principal, sedangkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berperan sebagai agent yang bertanggung jawab mengelola dan melaporkan keuangan publik secara transparan dan akuntabel (Rahmawati & Trisnawati, 2021). Perbedaan kepentingan serta asimetri informasi antara principal dan agent berpotensi menimbulkan konflik keagenan, terutama ketika aparatur pemerintah lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok dibandingkan kepentingan publik, sehingga dapat berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Dalam rangka mengurangi potensi konflik keagenan, diperlukan mekanisme pengendalian dan pengawasan yang memadai, Tauhid et al., (2024). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), *Good governance*, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI) sebagai instrumen pengendalian mampu menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga

meningkatkan kualitas laporan keuangan OPD Kabupaten Mukomuko sesuai dengan harapan masyarakat sebagai principal, (I. Astuti, 2022; Ismail, 2024).

2.1.2 Stewardship Theory

Stewardship Theory pertama kali dikemukakan oleh Donaldson & Davis, (1991), yang menjelaskan bahwa manajer atau aparatur (*steward*) tidak hanya berorientasi pada kepentingan pribadi, melainkan berfokus pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan (Raharjo, 2023). Teori ini berasumsi bahwa individu pada dasarnya dapat dipercaya, memiliki integritas, loyalitas, serta motivasi intrinsik untuk bertindak demi kepentingan principal dan menghasilkan kinerja terbaik bagi organisasi (Eman et al., 2022; Widodo et al., 2025). Dengan demikian, *steward* dipandang mampu mengesampingkan kepentingan pribadi demi keberhasilan organisasi.

Dalam sektor publik, *Stewardship Theory* relevan untuk menjelaskan perilaku aparatur pemerintah dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah. Aparatur pemerintah diposisikan sebagai *good steward* yang bertanggung jawab menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan publik, sehingga keberhasilan organisasi pemerintah tercermin dari kepuasan masyarakat dan efektivitas tata kelola (Yuniar et al., 2023). Oleh karena itu, aparatur dituntut menyajikan laporan keuangan yang jujur, andal, dan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya sebagai bentuk tanggung jawab moral. Penerapan nilai-nilai stewardship tersebut diyakini mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan serta memperkuat kepercayaan masyarakat sebagai principal (Arifin, 2020; Indrayani & Widiastuti, 2020; Saputro et al., 2025).

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Mardiasmo, (2018), Kualitas laporan keuangan pemerintah adalah kemampuan laporan keuangan dalam menyajikan informasi yang bermanfaat dan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan publik. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Kualitas laporan keuangan tercermin dari kemampuan informasi keuangan dalam mendukung evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan pengguna.

Laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Sejalan dengan temuan (Indrayani & Widiastuti, 2020; Biduri et al., 2021) yang menyatakan bahwa pemenuhan karakteristik kualitatif berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengemukakan karakteristik kualitatif suatu laporan keuangan yaitu ukuran-ukuran normatif yang diwujudkan dalam informasi akuntansi untuk dapat memenuhi tujuannya. Menurut PP No. 71 Tahun 2010, laporan keuangan pemerintah dikatakan berkualitas apabila memiliki karakteristik kualitatif sebagai berikut:

1. Relevan

Suatu laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang terkandung didalamnya dapat mempengaruhi keputusan para pemakai dan membantu untuk mengevaluasi peristiwa dimasa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan, dan mengoreksi hasil evaluasi dimasa lalu. Oleh karena itu, informasi suatu laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi

keuangan yang relevan mempunyai karakteristik antara lain :

a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi laporan keuangan yang dihasilkan memungkinkan pemakai untuk mengoreksi ekspektasi di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Adanya informasi laporan keuangan dapat membantu pemakai dalam memprediksi masa yang akan datang berdasarkan atas hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu

Informasi laporan keuangan yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi laporan keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yang berisi semua informasi akuntansi sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan hambatan yang ada.

2. Andal

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, akan tetapi jika penyajiannya tidak bisa diandalkan maka pemakaian informasi tersebut secara potensial bisa menyesatkan. Laporan keuangan yang informasinya bisa diandalkan mempunyai karakteristik sebagai berikut:

a. Penyajian jujur

Suatu informasi transaksi atau peristiwa lainnya disajikan secara jujur/sesuai dengan apa yang terjadi dan seharusnya disajikan dengan wajar.

b. Dapat diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan hasil pengujian bersifat konsisten yang apabila pengujian dilakukan lebih dari satu kali oleh pihak yang berbeda, maka hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda.

c. Netralisasi

Informasi yang disajikan laporan keuangan ditujukan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak untuk kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan akan berguna jika bisa dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain pada umumnya. Perbandingan bisa dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan internal dilakukan apabila suatu entitas

menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun, sedangkan perbandingan eksternal dilakukan apabila suatu entitas dibandingkan dengan entitas lain yang masing-masing menggunakan kebijakan akuntansi sama.

4. Dapat dipahami

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan harus bisa dipahami oleh pemakai dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman para pemakai. Oleh karena itu, jika para pengguna mempunyai pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi suatu entitas pelaporan, serta adanya kemauan pemakai untuk mempelajari informasi yang tertuang dalam laporan keuangan.

2.1.4 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas informasi keuangan yang dihasilkan. Mardiasmo, (2018), standar akuntansi berfungsi sebagai pedoman dalam perlakuan akuntansi agar laporan keuangan dapat disusun secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pengguna laporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penerapan SAP mencakup pengaturan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan pemerintah. Dengan

demikian, SAP menjadi dasar penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Penerapan SAP yang baik akan mendorong tersusunnya laporan keuangan pemerintah yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Sebaliknya, penerapan SAP yang tidak optimal dapat menimbulkan permasalahan dalam kualitas laporan keuangan, seperti rendahnya reliabilitas informasi, ketidakkonsistenan pelaporan, serta kesulitan dalam proses pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan (Khasanah & Nilasari, 2023).

Oleh karena itu, konsistensi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam setiap tahapan proses akuntansi menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sejalan dengan Sinurat et al., (2023) yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi secara konsisten dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah.

Indikator penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam penelitian ini mengacu pada substansi pengaturan SAP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemilihan indikator didasarkan pada aspek-aspek utama yang secara langsung mencerminkan sejauh mana SAP diterapkan dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

1. Pengakuan dan pengukuran transaksi keuangan pemerintah

mencerminkan kesesuaian perlakuan akuntansi atas aset, kewajiban, pendapatan, dan beban dengan ketentuan SAP. Pengakuan dan pengukuran yang tepat

menjadi dasar utama dalam menghasilkan informasi keuangan yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Penyajian laporan keuangan pemerintah

menggambarkan kesesuaian format, struktur, serta konsistensi penyajian laporan keuangan dengan ketentuan SAP. Penyajian laporan keuangan yang sesuai standar bertujuan untuk meningkatkan keterbandingan dan kejelasan informasi bagi para pengguna laporan keuangan.

3. Pengungkapan informasi keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Pengungkapan yang memadai melalui CaLK berfungsi untuk memberikan penjelasan tambahan atas angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, sehingga pengguna laporan dapat memahami kondisi keuangan pemerintah daerah secara lebih komprehensif dan transparan.

4. Penerapan basis akrual dalam pelaporan keuangan pemerintah

karakteristik utama SAP sebagaimana diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Penerapan basis akrual mencerminkan pengakuan pendapatan dan beban pada saat terjadinya transaksi, bukan pada saat kas diterima atau dikeluarkan, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai posisi keuangan dan kinerja pemerintah daerah.

2.1.5 *Good governance*

Menurut Karso, (2022). *Good governance* merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan,

dalam sektor publik, *Good governance* menjadi prinsip fundamental untuk memastikan bahwa pemerintah mengelola sumber daya publik secara profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penerapan *Good governance* mendorong pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel, transparan, serta sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Darmawaty & Nirwana, 2023; Purwanti, 2022).

Prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan dikemukakan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) (1997) yang meliputi partisipasi, akuntabilitas, aturan hukum (*rule of law*), transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, serta visi strategis (Arifudin et al., 2020). Kesembilan prinsip tersebut menjadi landasan konseptual dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, penerapan *good governance* memiliki peran penting dalam menjamin terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Namun, tidak seluruh prinsip *good governance* digunakan sebagai indikator pengukuran dalam penelitian ini. Pada prinsip-prinsip *good governance* yang memiliki keterkaitan langsung dengan proses pengelolaan dan pelaporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mukomuko, sehingga pengukuran yang dilakukan menjadi lebih fokus dan operasional.

Berdasarkan kajian teoritis serta relevansinya terhadap kualitas laporan keuangan sektor publik, indikator *good governance* dalam penelitian ini disesuaikan dari prinsip-prinsip *good governance* yang dikemukakan oleh UNDP

(1997). Adapun indikator *good governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Transparansi

Transparansi mencerminkan keterbukaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyediakan informasi keuangan yang lengkap, jelas, dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas menunjukkan adanya pertanggungjawaban OPD dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Aturan Hukum (*Rule of Law*)

Aturan hukum berkaitan dengan tingkat kepatuhan OPD terhadap peraturan perundang-undangan serta standar akuntansi pemerintahan dalam proses pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan.

4. Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi mencerminkan kemampuan OPD dalam memanfaatkan sumber daya keuangan secara optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi

5. Responsivitas

Responsivitas menunjukkan kemampuan OPD dalam menanggapi kebutuhan, masukan, serta hasil pengawasan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelaporan keuangan.

2.1.6 Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Sistem Pengendalian Intern (SPI) Hery, (2020) merupakan suatu proses yang dirancang dan dijalankan oleh manajemen dan seluruh pegawai organisasi untuk memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan organisasi, yang meliputi efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam sektor publik, sistem pengendalian intern berperan penting dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan serta mencegah terjadinya kesalahan dan kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan (Indrayani & Widiastuti, 2020; Utami & Berliani, 2024)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjelaskan bahwa pengendalian intern merupakan proses yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang andal, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Mujennah et al., 2022)

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern merupakan suatu rangkaian tindakan yang terintegrasi dan mencakup keseluruhan proses dalam organisasi. Kerangka pengendalian intern COSO dikembangkan oleh organisasi profesi yang terdiri dari *American Accounting Association (AAA)*, *American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)*, *Institute of Internal Auditors (IIA)*, *Institute*

of Management Accountants (IMA), dan Financial Executives Institute (FEI) (Efa Wahyu Prastyaningtyas, 2019)

Menurut COSO, Adapun indikator sistem pengendalian intern, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian merupakan dasar dari seluruh komponen pengendalian intern yang mencerminkan sikap, kesadaran, dan tindakan manajemen dalam menetapkan integritas, nilai etika, serta struktur organisasi. Lingkungan pengendalian mencakup komitmen manajemen terhadap integritas dan etika, struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas dan tanggung jawab, kebijakan dan praktik sumber daya manusia, serta pengaruh eksternal yang memengaruhi organisasi.

2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Penilaian risiko merupakan proses identifikasi dan analisis terhadap berbagai risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi, baik risiko strategis, risiko keuangan, maupun risiko informasi. Dengan memahami risiko yang dihadapi, manajemen dapat menentukan langkah-langkah pengendalian yang tepat untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan atau kecurangan dalam pelaporan keuangan.

3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk memastikan bahwa arahan manajemen telah dilaksanakan dengan baik. Aktivitas pengendalian meliputi persetujuan atas transaksi, pemisahan tugas dan tanggung jawab, penggunaan dokumen dan catatan yang memadai,

perlindungan terhadap aset dan catatan keuangan, serta adanya peninjauan independen terhadap kinerja.

4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Informasi dan komunikasi berkaitan dengan sistem yang digunakan organisasi untuk mengidentifikasi, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi keuangan. Sistem informasi yang baik akan menghasilkan informasi yang relevan, andal, dan tepat waktu sehingga dapat digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan serta mendukung penyusunan laporan keuangan yang berkualitas

5. Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan merupakan proses penilaian berkelanjutan terhadap kinerja sistem pengendalian intern untuk memastikan bahwa pengendalian berjalan secara efektif. Pemantauan dapat dilakukan melalui supervisi yang efektif, penerapan akuntansi pertanggungjawaban, serta pelaksanaan audit internal secara berkala

Sistem pengendalian intern memiliki fungsi utama untuk mencegah terjadinya kecurangan, menjamin kepatuhan terhadap anggaran dan peraturan yang berlaku, serta memastikan tersedianya informasi keuangan dan nonkeuangan yang andal untuk mendukung pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penerapan sistem pengendalian intern yang efektif diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) (Indrayani & Widiastuti, 2020; Athar et al., 2021; Putra, 2021).

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian, Tahun, judul	Rumusan Masalah	Metode	Hasil Penelitian
1	(Utami & Berliani, 2024) Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, <i>Good Governance</i> dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bandung Tahun 2022) Jurnal Maneksi Vol 13, No. 2, Juni 2024 Rachma Hida Silfa Utami, Kartika Berliani.	1. Apakah SAP Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 2. Apakah <i>Good Governance</i> Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 3. Apakah SPI Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	- Kuantitatif; 82 responden; probability sampling; kusioner	1. SAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. 2. <i>Good governnace</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. 3. SPI berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
2	(Elvina et al., 2025) Pengaruh Penerapan <i>Good Governance</i> , Sistem Akuntansi Keuangan Daerah , Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar Jurnal Riset Akuntansi 2025	1. Apakah Penerapan <i>Good Governance</i> Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 2. Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 3. Apakah Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh	- Kuantitatif; 60 responnden; purposive sampling; kusioner	1. Penerapan <i>Good Governance</i> Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangana 2. Sistem Akuntansi Keungan Daerah Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 3. Sistem Pengendalian Internal Bepengaruh

	Putu Elvina Tiara Indryanigraha, Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi ,	Terhadap Kualitas Laporan Keuangan		Terhadap Kualitas Laporan Keuanagn
3	(Nurcholis & Sulistyowati, 2024) Pengaruh <i>Good Governance</i> , Pengendalian Internal , dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada RSUD dr Iskak Kabupaten Tulungagung) Journal Of Sharia Economics Banking And Accounting, Vol 1, No. 2, 2024 p. 101-115 Mochammad Nurcholis, Erna Sulistyowati.	1. Apakah <i>Good Governance</i> Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuanagn 2. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuanagan	- Kuantitatif; 35 Responden; Teknik Sampling; Kusioner	1. <i>Good Governance</i> Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 2. Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
4	(Ramadhan & Fahrani, 2024) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu)	1. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 2. Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 3. Apakah Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh	- Kuantitatif; 52 Responden; Purposive Sampling; Kusioner	1. SAP Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 2. SAKB Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 3. SPI Tidak Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

	Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma) Volume : 04 Nomor 01 Maret 2024, Rizky Ramadhan, Uni Fahrani	Terhadap Kualitas Laporan Keuangan		
6	(Sari et al., 2022) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, <i>Good Governance</i> Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten Batang) Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Auditing Vol.3 (No.1), 2022 Fangela Myas Sari	1. Apakah penerapan SAP Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 2. Apakah KAPD Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 3. Apakah <i>Good Governance</i> Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 4. apakah PITK berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan	- Kuantitatif; 63 Responden; Purposive Sampling; Kusioner	1. Penerapan SAP Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 2. KAPD Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 3. <i>Good Governance</i> tidak berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 4. PITK tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
7	(Astuti & Amira, 2023) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada SKPD Kabupaten Bengkulu Selatan Jurnal Economic Edu E-ISSN : 2746-5004; Vol 4 No 1 Juli 2023. Almh Budi	1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 2. Apakah Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	- Kuantitatif; 39 Responden; Purposive Sampling; Kusioner	1. Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 2. Sistem Pengendalian Intern Tidak Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

	Astuti dan Lala Amira			
8	(Kamandita & Suwandi, 2025) Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderasi Jurnal Riset Akuntansi Volume 3, Nomor 1, Tahun 2025. Aurelia Zarah Kamandita¹, Suwandi	1. Menganalisis Pengaruh Penerapan (SIA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Dengan Kompetensi SDM Sebagai Variabel Moderasi 2. Menganalisis Pengaruh (SPI) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Dengan Kompetensi SDM Sebagai Variabel Moderasi 3. Menganalisis Pengaruh (SDM) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Dengan Kompetensi SDM Sebagai Variabel Moderasi	- Kuantitatif Dengan Teknik Analisis Partial Least Squares (PLS); 36 Responden; Purposive Sampling; kusioner	1. Sistem Informasi Akuntansi Tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 2. Sistem Pengendalian Internal Tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 3. Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 4. Kompetensi SDM memoderasi pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 5. Kompetensi SDM tidak memoderasi pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
9	(Siti et al., 2025)	1. Apakah <i>Good Governnace</i> Berpengaruh	- Kuantitatif;	1. <i>Good Governnace</i> Berpengaruh

	<i>Improving Financial Report Quality Through Good Governance and Accounting Standards in Berau Regency</i> <i>International Journal of Economics and Management Research; 2025</i> (April), vol. 4, no. 1, Munawaroh, et al. Siti Munawaroh, Sayugo Adi Purwanto, Djupiansyah Ganie, Caetano Carceres Correia	Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 2. Apakah Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	60 Responden; Purposive Sampling; Kusioner	Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 2. Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
10	(Tabupook & Ika, 2024) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Vol. 8 No. 3, 2024. Alvi Angelica Tabupook, Ika Wulandari	1. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 2. Apakah <i>Good Governnace</i> Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	- Kuantitatif; 70 Responden; Purposive Sampling; Kusioner	1. Penerapan SAP Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 2. <i>Good Governance</i> Tidak Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

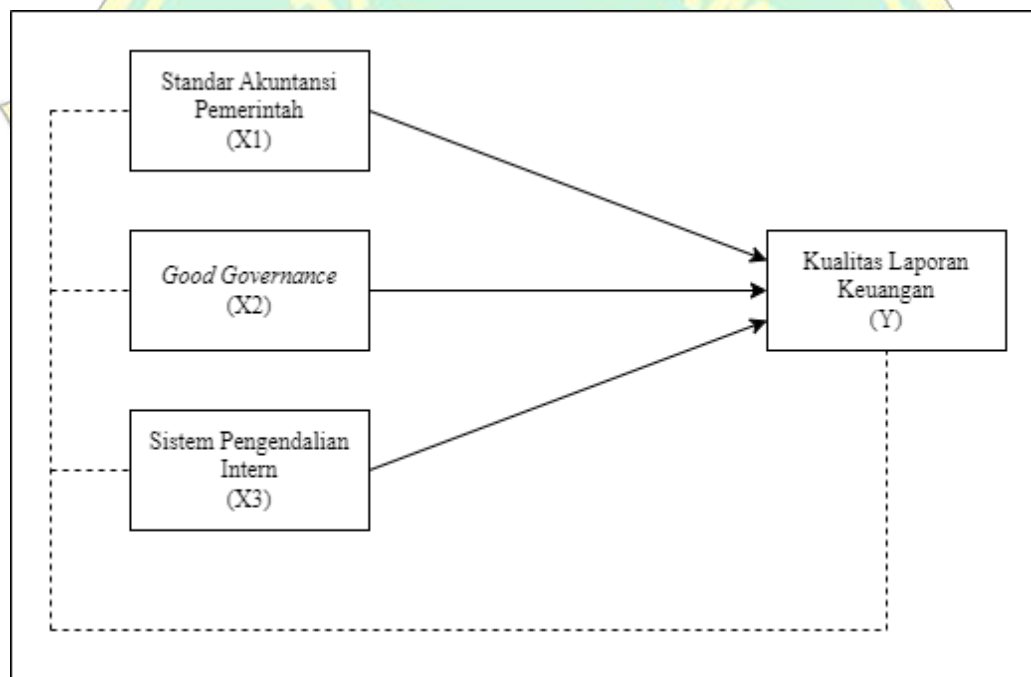
Sumber: Data Diolah Peneliti, (2025)

2.3 Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), *Good governance*, dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Mukomuko.

Hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar kerangka konseptual berikut:

Gamabar 2.1
Kerangka Konseptual



Keterangan:

—————> = Parsial

- - - - - = Silmulta

2.4 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah daftar variabel penelitian yang dapat diukur. Tujuan pembuatan definisi operasional adalah untuk memberikan batasan yang

jelas untuk setiap variabel, menentukan indikator yang dapat diukur, dan menetapkan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Penelitian ini menggunakan tiga variabel penelitian yaitu dua variabel independen:

Standar Akuntansi Pemerintah (X1), *Good governance* (X2), dan Sistem Pengendalian Intern (X3), serta satu variabel dependen: Kualitas Laporan Keuangan (Y). Definisi operasional masing-masing variabel dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi	Indikator	skala
1.	Standar Akuntansi Pemerintah (X1)	Standar akuntansi yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.	1. Pengakuan dan pengukuran transaksi keuangan 2. Penyajian laporan keuangan 3. Pengungkapan dalam CaLK 4. Penerapan basis akrual	likert
2.	<i>Good governance</i> (X2)	Prinsip tata kelola pemerintahan yang menjunjung transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan dalam pengelolaan keuangan daerah	1. Transparansi 2. Akuntabilitas 3. Aturan hukum (<i>Rule of Law</i>) 4. Efektivitas dan efisiensi 5. Responsivitas	likert
3.	Sistem Pengendalian Intern (SPI) (X3)	Proses pengendalian yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas efektivitas operasi, keandalan pelaporan keuangan,	1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian risiko 3. Aktivitas pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan	likert

		dan kepatuhan terhadap peraturan		
4.	Kualitas laporan keuangan (Y)	Tingkat kemampuan laporan keuangan pemerintah daerah dalam menyajikan informasi yang bermanfaat, andal, dan sesuai dengan ketentuan SAP	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami	likert

Sumber: Data Diolah Peneliti, (2025)

2.5 Hipotesis

Hipotesis dapat dipahami sebagai jawaban teoritis atas rumusan masalah penelitian, bukan jawaban empiris. Ini karena hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dan didasarkan pada teori yang relevan Hipotesis penelitian Adalah ;

2.5.1 Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan pedoman resmi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah yang bertujuan menghasilkan informasi yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Penerapan SAP mencakup keseragaman pencatatan, transparansi, dan keandalan informasi keuangan. Implementasi SAP dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan menyajikan data yang konsisten, memudahkan analisis, serta mendukung pengambilan keputusan. Efeknya termasuk peningkatan kepercayaan publik, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan penerapan SAP yang baik, proses penyusunan laporan keuangan menjadi lebih sistematis,

efisien, dan dapat menekan risiko kesalahan pencatatan serta ketidaksesuaian informasi.

Stewardship Theory memandang aparatur pemerintah sebagai *steward* yang bertindak untuk kepentingan publik dengan dasar komitmen dan tanggung jawab moral Donaldson & Davis, (1991). Teori ini menekankan bahwa aparatur yang memahami dan menerapkan SAP dengan baik akan menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, SAP tidak hanya menjadi pedoman teknis, tetapi juga mencerminkan komitmen aparatur dalam pengelolaan dana publik secara bertanggung jawab. Teori ini membantu memahami bagaimana implementasi SAP mendukung kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian sebelumnya menunjukkan dukungan empiris terhadap pengaruh SAP terhadap kualitas laporan keuangan menurut Aminy et al., (2021) serta Yanti et al., (2020) menemukan bahwa penerapan SAP berkontribusi pada penyusunan laporan keuangan yang lebih andal dan transparan. Namun, beberapa penelitian lain menyebutkan bahwa efektivitas SAP bergantung pada pemahaman aparatur dan konsistensi implementasinya (Aimah et al., 2022; Lestari & Rahayu, 2021). Berdasarkan kerangka teori dan bukti empiris tersebut, hipotesis penelitian ini adalah:

H1: Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

2.5.2 Pengaruh *Good governance* Terhadap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Good governance adalah prinsip dasar dalam penyelenggaraan administrasi publik yang menekankan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan partisipasi masyarakat Purba, (2023). Penerapan *Good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah mendorong proses yang terbuka, akuntabel, dan bertanggung jawab. Efeknya termasuk peningkatan transparansi, pengurangan risiko penyalahgunaan anggaran, dan peningkatan kualitas informasi yang disajikan kepada pemangku kepentingan. Dengan tata kelola yang baik, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun lebih akurat, andal, dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan.

Teori *Agency* menjelaskan hubungan antara principal dan agent dalam sektor publik, di mana agent memiliki informasi dan kewenangan lebih sehingga berpotensi menimbulkan asimetri informasi dan perilaku oportunistik (Anggraini et al., 2024). Penerapan *Good governance* berperan sebagai mekanisme pengawasan yang mengurangi risiko tersebut dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Teori ini membantu memahami bagaimana prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas dapat memengaruhi kinerja aparatur dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.

Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya pengaruh positif *Good governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Putra, (2021) dan Ibrahim et al., (2024) menemukan bahwa implementasi *Good governance* meningkatkan keandalan informasi keuangan dan kepercayaan publik.

Meskipun beberapa penelitian lain menemukan pengaruh yang tidak signifikan (Aminy et al., 2021), bukti empiris secara umum mendukung peran *Good governance* dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Berdasarkan temuan tersebut, hipotesis penelitian ini adalah:

H2 : *Good governance* Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

2.5.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern (SPI) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah seperangkat prosedur dan kebijakan terintegrasi yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi, termasuk efektivitas, efisiensi, kepatuhan terhadap peraturan, perlindungan aset, dan pencegahan penyalahgunaan wewenang Utami & Berliani, (2024). Penerapan SPI yang efektif dapat meningkatkan keandalan, akurasi, dan konsistensi laporan keuangan pemerintah. Efeknya terlihat pada pengurangan risiko kesalahan penyajian informasi, peningkatan akuntabilitas, dan kemudahan dalam pengambilan keputusan. SPI membantu aparaturnya mengawasi proses keuangan agar sesuai standar dan regulasi yang berlaku (Dzaha & Ardini, 2023).

Teori *Agency* mendukung penerapan SPI sebagai mekanisme pengawasan untuk mengurangi risiko perilaku oportunistik dari *agent* Purba, (2023). SPI berfungsi sebagai alat kontrol internal yang memastikan laporan keuangan disusun dengan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Teori ini membantu menjelaskan pentingnya sistem pengendalian dalam menjaga transparansi dan kualitas informasi keuangan pemerintah daerah.

Beberapa penelitian mendukung pengaruh SPI terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Athar et al., 2021; Arista et al., 2023), menunjukkan bahwa penerapan SPI yang efektif meningkatkan keandalan laporan keuangan. Meski ada penelitian yang menyebut pengaruhnya tidak signifikan jika implementasinya kurang berkualitas (Astuti & Amira, 2023) bukti empiris umumnya menunjukkan SPI berperan penting dalam memperkuat kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini adalah:

H3: Sistem Pengendalian Intern (SPI) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

2.5.4 Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, *Good governance*, Dan Sistem Pengendalian Intern Secara Simultan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), *Good governance*, dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah tiga pilar penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. SAP memastikan penyusunan laporan keuangan konsisten, transparan, dan andal. *Good governance* mendorong akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan, mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran. SPI sebagai pengendalian internal menjaga kepatuhan regulasi, perlindungan aset, dan mencegah kesalahan. Ketiganya secara bersamaan membantu aparaturnya menyusun laporan yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Teori *Agency* menekankan pentingnya pengawasan untuk mengurangi perilaku oportunistik akibat asimetri informasi antara *principal* dan *agent* Purba,

(2023). *Stewardship Theory* menekankan aparaturnya bertindak sebagai steward dengan komitmen moral untuk kepentingan publik (Donaldson & Davis, 1991). Kombinasi SAP, *Good governance*, dan SPI mendukung penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Teori-teori ini menjelaskan bagaimana ketiga variabel bekerja secara simultan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan OPD.

Penelitian terdahulu menunjukkan pengaruh positif simultan ketiga variabel terhadap kualitas laporan keuangan. Menurut Era & Dwicaksono, (2023) dan Yanti et al., (2020) menemukan bahwa penerapan SAP, *Good governance*, dan SPI bersama-sama meningkatkan keandalan, akurasi, dan transparansi laporan keuangan. Meski beberapa studi menemukan variabel tunggal tidak selalu signifikan (Aimah et al., 2022; Aminy et al., 2021), hasil simultan menunjukkan efek positif yang konsisten. Berdasarkan hal ini, hipotesis penelitian adalah:

H4: Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), *Good governance*, Dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Secara Simultan Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan